



KPID: Baru Terbukti 1 Siswa Korban Kekerasan

Dugaan Jumlah Korban 15 Orang

KOTA, *Joglo Jogja* - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya telah melakukan

gelar kasus kekerasan salah satu SD di Kota Yogyakarta. Upaya itu dilakukan usai adanya aduan dari kepala sekolah dan kuasa hukum korban, sementara ini baru ada satu korban yang terbukti mengalami kekerasan. "Sampai saat ini kami telah menemukan kasus kekerasan yang terbukti ada SD

Swasta di Kota Yogyakarta. Jadi tidak seheboh berita yang beredar, 15 orang," ungkap Ketua KPID Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani dalam jumpa pers di Balai Kota Yogyakarta, kemarin. Sylvi mengungkapkan, saat ini polisi juga telah melakukan pendalaman kasus dan melakukan BAP dengan cara dan metode

yang profesional khusus untuk anak. Selanjutnya, untuk penanganan psikologis dilakukan oleh UPT PPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta. "Kemarin sudah kita sepakat, UPT PPA akan meng-

koordinir penanganan psikologisnya untuk 10 anak-anak lain di SD yang viral dan terkena dampaknya. Jadi ini kita semua harus sama-sama bekerja secara lebih halus upaya anak-anak tidak menjadi korban berikutnya," terangnya. Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengata-

kan, pihaknya terus melakukan pendampingan supaya dampak yang ditimbulkan kepada anak tidak signifikan. Karena melihat kasus ini sangatlah sensitif, lantaran mereka adalah penerus bangsa. "Supaya kedepannya mereka tidak trauma dengan apa yang terjadi. **Baca KPID... Hal II**



Sylvi Dewajani
Ketua KPID Kota Yogyakarta

KPID: Baru Terbukti 1 Siswa Korban Kekerasan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Sehingga kita melakukan strategi yang halus untuk melakukan pendekatannya. Kita menghargai proses hukum terus berjalan, yang salah supaya bisa dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Singgih menambahkan, dalam kejadian kali ini yang

harus dilindungi adalah anak-anak, guru, dan sekolah itu sendiri. Jangan sampai dampak yang dibesarkan berkepanjangan. Untuk penanganannya dilakukan dari berbagai sektor, seperti AP2KB, KPAID, Unit PPA sudah dilakukan.

"Dan itu semua kita lakukan secara tersentral. Di mana kami menunjuk Unit PPA untuk mengatur semuanya karena banyak yang ingin melakukan pendampingan. Karena jika banyak yang terlibat, trauma anak pasti terjadi," pungkasnya. **(riz/all)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005